

IMPLEMENTATION OF ARCHIPELAGO INSIGHTS IN NATIONAL INTEGRATION

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM INTEGRASI NASIONAL

Andika Ronggo Gumuruh ^{1a(*)} Tofan Priananda Adinata ^{2b}

¹Citizenship and Pancasila Education Study Program at PGRI University of Banyuwangi

²history education study program at PGRI University's of Banyuwangi

^a*andikaronggo@gmail.com*

^b*tofanprianandaadinata@gmail.com*

(*) Corresponding Author
andikaronggo@gmail.com

How to Cite: Andika Ronggo Gumuruh (2020). Title of article. Santhet, 4(1), 30-40.

doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 2 Desember 2019
 Revised : 9 Januari 2020
 Accepted : 8 April 2020

Keywords:

Implementation national integration;
archipelago insight;

Abstract

The existence and prestorika glosnot that struck Eastern Europe result in Unisoviet countries and Yugoslavia disintegrating. Events over a significant impact on the Unitary Republic of Indonesia (NKRI), the regions fery-fery (penggiran) began to flare, the suburbs have aspirations for independence such as East Timor is now independent, the Free Aceh Movement (GAM), Papua Organization Merdeka (OPM), the South Maluku Republic (RMS). The seeds of disintegration of the more fertile when Suharto's authoritarian government with a military approach to evaluate policy without political borders to prosper his people. The existence of globalization, trade liberalization, and strengthening of new ethnicities (awareness of the rights of tribal nationalities) increasingly stronger demands of the suburbs of his rights to ask whether social, political and economic welfare to accelerate. The factors and conditions above lead freksi freksi and regional upheaval that gave birth to the potential for violence and bloody conflict. This is due to the absence of a shared perception among citizens. Archipelago is the answer to the same perception to live together in the corridor (the Republic of Indonesia) NKRI and realizing national integration.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tujuan nasional banyak mengalami kendala, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Pada tataran konsep tidak adanya kata sepakat antara perkataan dan perbuatan di antara para elit politik. Contoh kongkrit konsep ekonomi liberal, **ekonomi kerakyatan** dan perwujudan *Welfare State (negara kesejahteraan)*. Konsep ekonomi liberal mengutamakan kepentingan pasar bebas dan merupakan salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilesme, liberaliseme, dan *keynesianisme* dan *neoliberalisem* yang merupakan upaya untuk mengoreksi kelemahan dalam liberalisme (Revisond Baswir, KR, 17 Mei 2009; 1). Salah satu argumen

utama ekonomi liberal adalah bahwa sistem ini dapat menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lebih teratur atau terpusat. Mekanisme pasar bebas dan persaingan dianggap mampu mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, serta penurunan biaya produksi dan konsumsi. (Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2017)

Dalam paham ekonomi pasar liberal, diyakini bahwa pasar memiliki kemampuan dapat mengurus sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus pasar tidak diperlukan sama sekali. Tujuan konsep ini adalah kebebasan individu untuk bersaing secara sempurna di pasar, kepemilikan pribadi terhadap faktor produksi, pembentukan harga pasar dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Namun konsep ini

tersisih oleh **negara kesejahteraan** peranan negara dalam ekonomi tidak dibatasi sebagai pembuat peraturan tetapi diperluas untuk membuat kewenangan dan melakukan intervensi terhadap viskal maupun moneter. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, negara kesejahteraan dengan tegas mengatakan "selama masih ada pengangguran campur tangan negara dalam perekonomian dibenarkan".

Paham yang berkembang di Indonesia masih ada ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang lebih **berpihak pada kepentingan rakyat** (Suharto, KR, 25 Mei 2009; 1). Kepentingan rakyat di antara menghidupkan usaha kecil dan menengah, melindungi dan menghidupkan pasar tradisional, dan mengusahakan dunia usaha dalam konteks sektor riil, memberdayakan masyarakat kecil. Kebijakan pemerintah tidak liberalis-kapitalistik, mengurangi kemiskinan, perlindungan terhadap sumber daya alam. Pembuatan undang-undang Penanaman Modal, UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), Badan Layanan Umum (BLU) yang berpihak untuk kepentingan rakyat. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanaman modal asing harus berpihak untuk kepentingan rakyat kecil.

Ketiga konsep tersebut di atas mewarnai kebijakan pemerintah sekarang, Wawasan nusantara diharapkan mampu menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda dalam masyarakat dan memberikan solusi untuk mendasari Ketahanan Nasional suatu bangsa, sehingga tujuan nasional dapat teralisasi.

Dalam Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional sebagai konsep pemikiran bersifat **inklusif** menerima pembaharuan masukan untuk kepentingan kemajuan bangsa. Wawasan Nusantara memainkan peran penting dalam integrasi dan pembangunan nasional. Konsep ini mendorong adanya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan keberagaman Indonesia, sehingga dapat memperkuat persatuan bangsa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Komaruddin, A. (2018), Wawasan Nusantara dan Identitas Bangsa) Wawasan Nusantara diimplementasikan melalui berbagai kebijakan publik di Indonesia, termasuk kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan budaya. Konsep ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Wawasan Nusantara. (Wardhana, W. (2019). Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional)

Menurut pemikiran Rizal Ramli bangsa ini akan cepat makmur jika pemimpin-pemimpin kita melakukan transformasi seluruh hidupnya untuk kepentingan rakyat; baik pemikirannya, seluruh

hartanya, Waktu dan tenaganya, segalanya untuk kepentingan rakyat dan bersedia tampil *all out* untuk kepentingan rakyat (Metro TV Mei 2009). Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh PM Mahatir dari Malaysia, PM Li Kwanyu dari Singapura, sehingga negara tersebut lebih cepat makmur meninggalkan Indonesia. Kemakmuran bangsa juga melibatkan pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, kesempatan berusaha, dan pengembangan keterampilan dan kapasitas individu. Pemberdayaan ekonomi memungkinkan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. (World Bank. (2019). World Development Report: The Changing Nature of Work) Kemakmuran bangsa juga melibatkan kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya, pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam mencapai kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. (United Nations Development Programme (UNDP). (2018). Gender Inequality Index)

Sedang menurut Amin rais dalam orasinya "*Selamatkan Indonesia*" untuk menyejahterakan rakyat perlu penataan negara lebih terencana dan pemimpin-pemimpin bangsa tidak menjadi kakitangan asing (*komprador*) untuk menguras kekayaan bangsa Indonesia (Amin Rais, Juni 2008). Menurut Hussein Alatas dalam *The Sociologi of Coroption* (1968) di Indonesia korupsi semakin menggurita yang kalau dibiarkan akan membunuh negara Indonesia sendiri (Sutjipto Raharjo, Kompas, 18 Mei 2009; 6). Prabowo juga mengatakan perlu menihilkan pengangguran dan kemiskinan untuk menyejahterakan rakyat (Metro TV 20 Mei 2009). Kesejahteraan rakyat juga terkait dengan kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. (United Nations Development Programme (UNDP). (2018). Gender Inequality Index). Kesejahteraan rakyat juga melibatkan keamanan dan keadilan sosial, di mana individu merasa aman, bebas dari kekerasan, dan memiliki perlindungan hukum yang adil. (United Nations Development Programme (UNDP). (2017). Human Development Report). Kesejahteraan rakyat juga berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup secara umum, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, perumahan yang aman, dan lingkungan yang sehat. (United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Human Development Report)

Berdasarkan uraian di atas apapun pemikirannya untuk mewujudkan *Indonesia Dream* (mimpi bangsa Indonesia yang ideal) perlu kesamaan persepsi, kesamaan pandangan, dan kesamaan dalam implementasinya. Konsep Wawasan Nusantara memberikan solusi untuk menyamakan pandangan

yang sama sehingga dapat mewujudkan Integrasi nasional seperti yang diharapkan bangsa Indonesia dan integrasi nasional dapat mewujudkan kesejahteraan.

LANDASAN TEORI Wawasan Nusantara

Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggapan indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penglihatan atau tanggapan indrawi, Wawasan juga mempunyai pengertian menggabungkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tanggapan indrawi.

Nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk kata yang berasal dari istilah *nation* berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri ke dalam kehidupan bernegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yang telah menegara. Nusantara, istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara Benua Asia Benua Australia.

Wawasan Nasional merupakan "cara pandang" suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari falsafat bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya. **Esensinya**; bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Bagaimana bangsa tersebut memandang diri dan lingkungannya.

Dengan demikian Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara juga melibatkan pemahaman sejarah Indonesia dan peranannya dalam membentuk identitas nasional. Konsep ini menekankan pentingnya menelusuri jejak sejarah dan peradaban di Indonesia untuk memahami keberagaman dan kekayaan budaya bangsa. (Reid, A. (2010). *Indonesia's History: Between Wantilan and Kepala Desa*).

Wawasan Nusantara juga memiliki landasan teori dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik. Konsep ini mendorong inklusi pendidikan yang merangkul keberagaman budaya dan sosial serta kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan bersama. (Sudibyo, A., & Azra, A. (2018). *Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Wawasan Nusantara dalam Kurikulum 2013*).

Wawasan Nusantara mencakup kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam

menjaga persatuan dan keadilan sosial di Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang inklusif, partisipatif, dan adil dalam mengelola sumber daya dan kepentingan nasional. (Soesastro, H., & Arifin, B. (2015). *Wawasan Nusantara and Indonesian Leadership in Global Governance*).

Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Secara konstitusional, Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E, Pokok-pokok Wawasan Nusantara dinyatakan sebagai Wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik dalam arti:
 - a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bahwa bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Kesatuan Sosial dan Budaya dalam arti:
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya,

- yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Ekonomi dalam arti:
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan Negara (Lemhanas, 1989: 7).

Dengan ditetapkannya rumusan Wawasan Nusantara sebagai ketetapan MPR, maka Wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggara Negara, semua Lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan hakekat rumusan Wawasan Nusantara.

Konsep kepulauan dalam Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Situ Gintung et al. (2017) menyatakan bahwa sumber daya alam yang beragam di Indonesia harus dikelola secara bijaksana untuk mendukung pembangunan nasional. (Sumber: Situ Gintung, H., Yusoff, Y., & Ahmed, S. (2017). *The Concept of Wawasan Nusantara in the Context of Indonesian Marine Resource Management*)

Wawasan Nusantara mengakui keberagaman budaya di Indonesia sebagai landasan untuk pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Nursal (2020), keberagaman budaya harus diintegrasikan dalam pembangunan nasional untuk mencapai kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat. (Sumber: Nursal, A. (2020). *Wawasan Nusantara: Dari Visi Bangsa hingga Tantangan Pembangunan di Era Global*)

Konsep Wawasan Nusantara menekankan pentingnya keterpaduan antarwilayah dalam pembangunan nasional. Menurut Hadiwinata (2016), pembangunan regional yang seimbang dan berkelanjutan harus menjadi fokus dalam mewujudkan Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. (Sumber: Hadiwinata, B. S. (2016). *Wawasan*

Nusantara: Sebuah Pemikiran untuk Memperkuat Integrasi Bangsa Indonesia)

Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan Nasional juga melibatkan peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Wibowo et al. (2018), pendidikan yang berorientasi pada penguatan identitas nasional dan pemahaman terhadap keberagaman budaya di Indonesia diperlukan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Sumber: Wibowo, A., Ramdhani, M. A., & Darmaningtyas, D. P. (2018). *Wawasan Nusantara dalam Pendidikan Sejarah untuk Penguatan Identitas Nasional*)

kepemimpinan yang baik dan tata kelola yang efektif dalam mewujudkan Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Menurut Siregar et al. (2019), kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Sumber: Siregar, R., Wahyudi, S., & Wijaya, R. (2019). *Pengembangan Wawasan Nusantara di Era Transformasi Pembangunan Nasional*)

Integrasi Nasional

Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran/penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh/bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 2006:36).

Hal-hal yang menyangkut bangsa dapat berupa adat istiadat, suku, warna kulit, keturunan, agama, budaya, wilayah/daerah dan sebagainya. Sehubungan dengan penjelasan kedua istilah di atas maka integritas nasional identik dengan integritas bangsa yang mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 2006:36-37) yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan

dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Integritas nasional sebagai suatu konsep dalam kaitan dengan wawasan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada aliran pemikiran/paham integralistik yang dicetuskan oleh G.W.F. Hegl (1770- 1831 dalam Suhady 2006:38) yang berhubungan dengan paham idealisme untuk mengenal dan memahami sesuatu harus dicari kaitannya dengan yang lain dan untuk mengenal manusia harus dikaitkan dengan masyarakat

disekitarnya dan untuk mengenal suatu masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses sejarah.

Teori Integrasi

Nasionalisme adalah suatu paham yang mengajarkan bangsa yang bernegara yang dibangun dari masyarakat yang majemuk, dan warganya tersebut sungguh-sungguh bertekad untuk membangun masa depan secara bersama, dengan terlepas dari berbagai perbedaan ras, etnik, dan agama atau misalnya, dari ikatan kesetiaan yang melekat sejak lahir terhadap suku daerah kelahirannya. Suatu negara akan berfungsi dengan baik apabila memiliki dukungan idiologi nasionalisme, dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan demokrasi.

Nasionalisme adalah keyakinan bahwa negara bangsa adalah bentuk politik yang paling alami dan diinginkan, serta keyakinan akan kepentingan, hak, dan nilai-nilai kolektif kelompok nasional (Breuilly, 2016.). Menurut Smith (2013) Nasionalisme adalah perasaan kebanggaan, loyalitas, dan solidaritas terhadap kelompok nasional serta kepercayaan pada pentingnya keberadaan, kepentingan, dan hak kolektif kelompok nasional. Sedangkan Brubaker (2019) menjelaskan Nasionalisme adalah sebuah proyek politik, ideologi, dan emosi yang menggambarkan dan mempromosikan identitas nasional dan klaim kepentingan nasional dalam sebuah negara bangsa.

Nasionalisme dibangun dari semangat rakyat untuk bersatu, sedangkan demokrasi menjamin jati diri rakyat, penghormatan dan perlindungannya. Dalam hal ini keikutsertaan dalam kehidupan bernegara diwajibkan, sehingga semangat nasionalisme dan demokrasi dapat dibangun dengan baik yang diharapkan akan tercipta suatu stabilitas nasional yang tangguh, sekalipun dalam negara demokrasi berbagai kepentingan tidak akan hilang tetapi dapat ditekan atau larut dalam berbagai organisasi politik yang ada.

Semua itu dapat tercapai apabila pemerintahan itu baik seperti menegakkan keadilan dalam mengalokasikan sumberdaya nasional, baik antar sektor maupun antar wilayah, sehingga etnik diperlakukan dengan adil, dapat hidup dengan tenang, aman, serta dapat melaksanakan seluruh kegiatan kehidupan sosial dengan baik. Tetapi sebaliknya bila pemerintah mengalami kemunduran dalam kinerjanya, maka masing-masing golongan yang ada dalam masyarakat akan berjuang untuk memperoleh hak, serta akan memenuhi aspirasi sebagai kepentingan yang sah, maka demikian akan timbul kebangkitan etnik, dan lebih jauhnya lagi akan terjadi suatu gejolak dimasyarakat.

Berikut ini beberapa pengertian tentang integrasi Menurut Claude Ake (dlm Nazaruddin Syamsuddin, Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia (Lemhanas, Jakarta 1994, hal3) integrasi

nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok Yaitu :

1. Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara.
2. Bagaimana meningkatkan consensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat, consensus ini tumbuh dan berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.

Sedangkan menurut pakar sosiologi, Manrice Duverger dalam bukunya, mengatakan sebagai berikut: "Integrasi didefinisikan sebagai "dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian antara organisme hidup atau antar anggota-anggota dalam masarakat" Sehingga integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Dari dua pengertian tersebut diatas pada hakekatnya integrasi merupakan upaya politik/kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan Bersama dalam mencapai tujuan nasional dimasa depan untuk kepentingan bersama.

Menurut Geddes (2019) integrasi adalah proses sosial yang melibatkan penggabungan, kohesi, dan koordinasi berbagai entitas atau kelompok yang berbeda untuk mencapai hubungan yang lebih harmonis, saling bergantung, dan bertujuan bersama. Sedangkan Mayda (2018) Integrasi adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi, penggabungan, dan penyesuaian di antara orang-orang, kelompok, atau masyarakat yang berbeda secara budaya, sosial, atau ekonomi untuk mencapai keterkaitan dan koeksistensi yang lebih erat.

Proses integrasi disebabkan adanya, kebersamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI, adanya kesepakatan pemimpin, homogenitas sosial budaya serta agama, dan adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Nazarudin berpendapat istilah integrasi nasional merujuk kepada perpaduan seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi social, budaya, ekononi, maka pengertian integrasi nasional adalah menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Integrasi mempunyai dua dimensi, antara lain: integrasi horizontal dan integrasi vertikal.

1. Dimensi vertical dalam integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku

elite dan masa dengan cara menghilangkan, mengurangi perbedaan kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi.

2. Sedangkan dimensi horizontal mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh factor-faktor teritorial/ kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.

Menurut Nazaruddin Sjamsudin "Integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok social tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubunganhubungan social,ekonomi ,politik. Kelompok-kelompok sosial tersebut bisa terwujud atas dasar agama dan kepercayaan, suku, ras dan kelas".

Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif dengan tetap mengakui adanya perbedaan. Kemudian jalan menuju proses integrasi tidak selalu lancar atau mulus seringkali menemukan hambatan-hambatan, itu jelas ada seperti adanya primordialisme, suku, ras, agama dan bahasa. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu ada reaksi setuju dan tidak setuju, hal tersebut adalah wajar apabila suatu negara dibentuk dari suatu masyarakat yang majemuk, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan okeh kebijakan tersebut. Kelompok yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut akan merasa tidak puas maka kelompok tersebut akan menyalurkan kekecewaannya dalam masyarakat melalui kelompok-kelompok yang ada didalamnya. Integrasi masyarakat dalam negara dapat tercapai apabila:

1. Terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial
2. Sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit social yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial.
3. Terjadinya saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok social yang terhimpun didalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh.

METODE

Penelitian studi pustaka adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menggali pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu. Penelitian ini didasarkan pada literatur yang telah ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, artikel, dan sumber-sumber pustaka lainnya.

Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian mereka, kemudian membaca dan menganalisis secara kritis literatur tersebut. Hasil dari penelitian studi pustaka dapat berupa pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan terkini dalam bidang penelitian, kesenjangan pengetahuan yang ada, temuan-temuan yang signifikan, atau kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian studi pustaka, penting untuk mencari sumber-sumber pustaka yang relevan, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Analisis literatur dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema umum, perbedaan, dan konsistensi dalam literatur yang ada. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka konseptual atau teoritis yang mendukung penelitian lebih lanjut.

Penelitian studi pustaka sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, terutama ketika ada kebutuhan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi literatur yang telah ada sebelum memulai penelitian primer. Metodologi penelitian studi pustaka dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti.

Jadi, penelitian studi pustaka merupakan upaya sistematis untuk menyelidiki dan menganalisis literatur yang ada dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian yang dituju.

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN *Wawasan Nusantara dan Integrasi Wilayah*

Wawasan nusantara sebagai "cara pandang" bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dan hekitat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa. Sebagai landasan kerja bagi penyelenggaraan dan pembinaan hidup kebangsaan serta hidup kenegaraan perlu didasari oleh GBHN sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945) dan APBN sebagai produk legeslatif dan eksekutif (pasal 23 ayat 1 UUD 1945). Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan wawasan nusantara adalah di bidang politik, khususnya di bidang wilayah. Dengan diterimanya konsepsi wawasan nusantara (Konsepsi Deklarasi Juanda) di forum internasional terjaminlah integrasi teritorial kita, yaitu "Laut Nusantara, yang semula dianggap laut bebas" menjadi bagian integral wilayah Indosia. Di samping itu

pengakuan landas kontinen Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) menghasilkan pertumbuhan wilayah Indonesia yang cukup besar, sehingga menghasilkan luas wilayah Indonesia yang semula nomor 17 di dunia menjadi nomor 17 di dunia.

Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar bagi kesejahteraan bangsa, mengingat bahwa minyak, gas bumi, dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik di lepas pantai (*off shore*) maupun di laut dalam. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, termasuk tentangan dekat kita, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut teritorial maupun landas kontinen. Persetujuan tersebut dapat dicapai karena Indonesia dapat memberikan akomodasi kepada kepentingan negara-negara tetangga antara lain bidang perikanan (*traditional fishing right*) dan hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya. Penerapan wawasan nusantara di bidang komunikasi dan transportasi dapat dilihat dengan adanya satelit Palapa dan *Microwave System* serta adanya lapangan terbang perintis dan pelayaran perintis.

Dengan adanya proyek tersebut laut dan hutan tidak lagi menjadi hambatan yang besar sehingga lalu lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat lancar jalannya. Penerapan wawasan nusantara di bidang ekonomi juga lebih dapat dijamin mengingat kekayaan alam yang ada lebih bisa dieksploitasi dan dinikmati serta pemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarana menjadi lebih baik. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat dari dilanjutkannya kebijakan menjadikan bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika, sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan, dan berasaskan Pancasila. Tingkat kemajuan yang sama merata dan seimbang terlihat dari tersedianya sekolah di seluruh tanah air dan adanya universitas negeri di setiap provinsi.

Pengembangan Wawasan Nusantara dan Integrasi Wilayah adalah upaya untuk memperkuat pemahaman tentang keragaman geografis, budaya, dan sosial di dalam wilayah Nusantara serta mempromosikan integrasi dan keterhubungan antara berbagai wilayah di Indonesia.

Pengembangan Wawasan Nusantara dapat mencakup berbagai aspek, termasuk budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan lingkungan. Hal ini melibatkan pengakuan, penghargaan, dan pemahaman yang lebih baik terhadap keragaman budaya dan nilai-nilai yang ada di wilayah Nusantara, serta meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan sebagai negara Indonesia.

Integrasi wilayah berkaitan dengan upaya untuk membangun keterhubungan dan kerja sama

yang erat antara berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan interaksi sosial antar wilayah.

Politik Perbatasan Dalam Konteks Wawasan Nusantara

Kebijakan politik untuk mengamankan wilayah perbatasan belum seperti diharapkan, hal ini terbukti banyak wilayah yang tidak dirurus oleh Jakarta sehingga diklaim oleh negara tetangga seperti diungkapkan oleh Siswono (2005: 4) "Tahun-tahun ini kita dirisaukan oleh berita tentang rapuhnya batas-batas wilayah NKRI. Setelah Pulau Pasir di Wilayah Timor diakui milik Australia dan kita menerimanya, Sipadan dan Ligitan diputuskan Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia, tapal batas di Kalimantan digeser hingga 800 meter, pekerja pembuat Mercusuar di Ambalat diintimidasi polisi perairan Malaysia. Lalu lintas batas yang bebas, nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan hingga merapat ke pantai-pantai Sumatra (pulau-pulau Rondo di Aceh dan Sekatung di Riau).

Semua itu menunjukkan betapa lemahnya negara kita dalam menjaga batas luar wilayah NKRI" (Kompas, 20 April 2005: 4). Pada tahun 2002 terpampang di surat kabar kapal ikan asing yang meledak terbakar ditembak oleh kapal perang kita. Mengingat setiap hari ribuan kapal asing mencuri ikan di wilayah RI ada baiknya jika setiap bulan 10 kapal pencuri ikan ditembak meriam kapal patroli AL, agar jera. Jikalau yang terjadi penyelesaian damai di laut, maka pencurian ikan akan semakin hebat, dan penghormatan bangsa dan negara lain akan merosot.

Potensi desaharmoni dengan negara tetangga adalah masalah perbatasan, tentu tidak nyaman jika diperbatasan selalu tegang. Oleh karena itu perlu penegasan batas wilayah agar saling menghormati wilayah masing-masing negara. Suasana yang harmonis adalah kebutuhan hidup bertetangga dengan bangsa lain. Kondisi disepanjang perbatasan Kalimantan dengan kehidupan seberang perbatasan yang lebih makmur dapat mengurangi kebanggaan warga di perbatasan pada negara kita. Pulau-pulau di Kepulauan Riau yang ekonominya lebih berorientasi ke Singapura dengan menerima dolar Singapura sebagai alat pembayaran juga dapat merapuhkan rasa kebangsaan Indonesia pada para penghuni pulau tersebut. Perekonomian di Pulau Mianggas dan Pulau Marampit lebih berorientasi ke Filipina Selatan akan melemahkan semangat kebangsaan warganya.

Pengelolaan wilayah perbatasan perlu segera ditingkatkan dengan membentuk "Kementrian Perbatasan" yang mengelola kehidupan masyarakat perbatasan agar lebih makmur dan mendapat

kemudahan agar dapat mengakses ke daerah lain di wilayah NKRI. Wilayah NKRI perlu dijaga dengan penegasan secara defakto dengan menghadirkan penguasa local seperti lurah, camat seperti polisi dan tentara sebagai simbol kedaulatan negara. Meskipun memiliki ribuan pulau tetapi tidak boleh meremehkan eksistensi salah satu pulau atau perairan yang sekecil apapun pulau atau daratan, dan bila itu wilayah NKRI perlu dipertahankan dengan jiwa dan raga seluruh bangsa ini.

Politik perbatasan dalam konteks Wawasan Nusantara adalah upaya untuk mengelola, memantau, dan memperkuat hubungan serta keterkaitan antara wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia. Ini melibatkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu-isu politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan yang berkaitan dengan perbatasan negara. Dalam konteks Wawasan Nusantara, politik perbatasan bertujuan untuk memastikan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah negara serta mempromosikan kerja sama dan pembangunan yang berkelanjutan di sepanjang perbatasan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kerja sama antara negara bagian, pemerintah pusat, dan masyarakat di wilayah perbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Pentingnya politik perbatasan dalam konteks Wawasan Nusantara adalah untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan tidak menjadi hambatan bagi integrasi nasional dan pembangunan wilayah. Melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, politik perbatasan berkontribusi pada pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan pemeliharaan keamanan serta stabilitas di wilayah tersebut.

Kasus Ambalat

Bermula dengan lepasnya Timor Timur 1999, kemudian kekalahan diplomasi kita di Mahkamah Internasional dengan kasus Sipadan dan Ligitan, 2002 sehingga kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Lepasnya kedua pulau Sipadan dan Ligitan dengan waktu relatif singkat membuat rakyat Indonesia menjadi trauma akan lepasnya blok Ambalat yang kaya minyak ke tangan Malaysia. Kontruksi bangunan teritorial kita dilihat dari kepentingan nasional begitu rapuh dalam beberapa tahun terakhir ini. Sengketa dua blok wilayah Malaysia dan Indonesia kembali memanas. Masing-masing mengklaim sebagai wilayah mereka. Malaysia memberi nama Wilayah ND6 dan ND7 dan Indonesia memberi nama blok Ambalat dan Ambalat Timur (Rusman Ghazali, Kompas, 28 April 2005; 4).

Menurut Prof. Azmi Hasan, ahli strategi politik Malaysia, bantahan Indonesia sudah diantisipasi bahkan pemerintah Malaysia sudah menyiapkan segala bantahan sengketa Ambalat. Pemerintahan

Malaysia tidak meragukan lagi kesahihan kepemilikan atas klaim ND6 dan ND7 sebagai bagian miliknya atas dasar peta pantas benua 1979. Malaysia melakukan bantahan atas konsesi eksplorasi minyak yang diberikan kepada perusahaan ENI dan Unicoal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, dalam tulisannya Prof. Azmi membuat kalkulasi atas kekuatan militer Indonesia jika harus berhadapan dengan kekuatan militer Malaysia. Bahwa TNI tidak berada dalam keadaan optimal akibat embargo militer AS sejak beberapa tahun yang lalu. Sebagai contoh hanya 40% Jet tempur yang dimiliki TNI AU tidak dapat digunakan, karena ketiadaan suku cadang untuk mengoperasikan kekuatan secara penuh. Jet Sukoiw yang dimiliki Indonesia hanya mempunyai kemampuan radar, tanpa dibantu kelengkapan persenjataan yang lebih canggih lainnya. Pendek kata bahwa dalam sengketa ini kekuatan militer TNI juga telah diperhitungkan kekuatannya oleh para ahli strategi di Malaysia sebagai referensi pemerintah Malaysia dalam menentukan sikap terhadap sengketa di wilayah Ambalat (Rusman Gazali, 2005: 4).

Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional

Dalam usaha mencapai tujuan nasional masih banyak yang mempunyai pandangan berbeda atau persepsi berbeda. Untuk itu pemerintah Indonesia telah mempunyai rumusan dalam konsep pandangan nasional yang komprehensif dan integral dalam bentuk wawasan nusantara. Wawasan ini akan memberikan konsepsi yang sama pada peserta didik tentang visi ke depan bangsa Indonesia untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, sehingga akan menghasilkan integrasi nasional.

Secara teoretis integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan perasaan keterikatan pada suatu pranata dalam suatu lingkup teritorial guna memenuhi harapan-harapan yang bergantung secara damai di antara penduduk. Secara **etimologis**, integrasi berasal dari kata **integrate**, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kata bendanya **integritas** berarti **utuh**. Integrasi mempunyai pengertian "*to combine (part) into a whole*" atau "*to complete (something that is imperfect or incomplete) by adding parts*" dan "*to bring or come into equality by the mixing of group or races*". Secara teoritis integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan keterkaitan antar bagian yang menjadi satu. Oleh karena itu, pengertian integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh.

Integrasi berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Republik

Indonesia (NKRI) yang bersemboyan "Bhineka Tunggal Ika". Integrasi nasional merupakan hal yang didambakan yang dapat mengatasi perbedaan suku, antargolongan, ras, dan agama (SARA). Kebhinekaan ini merupakan aset bangsa Indonesia jika diterima secara ikhlas untuk saling menerima dan menghormati dalam wadah NKRI.

Menurut Sartono Kartodirdjo, integrasi nasional berawal dari integrasi teritorial dan merupakan integrasi geopolitik yang dibentuk oleh transportasi, navigasi, dan perdagangan, sehingga tercipta komunikasi ekonomi, sosial, politik, kultural yang semakin luas dan intensif. Pada masa prasejarah telah terbentuk jaringan navigasi yang kemudian berkembang dan sampai puncaknya pada masa Sriwijaya dan Majapahit serta yang pada zaman Hindia Belanda diintegrasikan melalui ekspedisi militer. Pada masa NKRI diperkokoh dengan adanya sistem administrasi yang sentralistik melalui sistem idukasi, militer, dan komunikasi (Sartono Kartodirdjo, 1993: 85).

Menurut Drake integrasi nasional adalah suatu konsep yang multidimensional, kompleks, dan dinamis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam integrasi nasional antara lain sebagai berikut. **Pertama**, pengalaman historis yang tampil sebagai kekuasaan yang kohesif, berawal dari

penderitaan yang menjadi bagian warisan bersama sebuah negara. **Kedua**, atribut sosio-kultural bersama seperti bahasa, bendera, bangsa yang membedakan dengan bangsa lain dan yang memungkinkan WNI memiliki rasa persatuan. **Ketiga**, interaksi berbagai pihak di dalam negara kebangsaan dan adanya interdependensi ekonomi regional (Filip Litay, 1997: 10).

Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan pluralistik. Oleh karena itu, bagi integrasi sosial budaya unsur-unsurnya memerlukan nilai-nilai sebagai orientasi tujuan kolektif bagi interaksi antarunsur. Dalam hubungan ini ideologi bangsa, nilai nasionalisme, kebudayaan nasional mempunyai fungsi strategis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menggantikan nilai-nilai tradisional dan primordial yang tidak relevan dengan masyarakat baru. Dengan demikian nilai nasionalisme memiliki nilai ganda, yaitu selain meningkatkan integrasi nasional, juga berfungsi menanggulangi dampak kapitalisme dan globalisasi serta dapat mengatasi segala hambatan ikatan primordial. Apabila dipikirkan antara integrasi dan nasionalisme saling terkait. Integrasi memberi sumbangan terhadap nasionalisme dan nasionalisme mendukung integrasi nasional. Oleh karena itu, integrasi nasional

harus terus dibina dan diperkuat dari waktu ke waktu. Kelalaian terhadap pembinaan integrasi dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa. Sebagai contoh, keinginan berpisah dari NKRI oleh sebagian masyarakat Papua, Aceh, dan Maluku karena selama

puluhan tahun mereka hanya sebagai objek dan bukan subjek. Mereka hanya mendapat janji-janji kesejahteraan tanpa bukti dan menentang ketidakadilan di segala bidang. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat dapat mengakomodasikan setiap isu yang timbul di daerah. Integrasi nasional biasanya dikaitkan dengan pembangunan nasional karena masyarakat Indonesia yang majemuk sangat diperlukan untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan agar pembangunan nasional tidak terkendala. Dalam hal ini kata-kata kunci yang harus diperhatikan adalah mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis dan saling membantu atau dalam koridor lintas SARA. Integrasi mengingatkan adanya kekuatan yang menggerakkan setiap individu untuk hidup bersama sebagai bangsa. Dengan integrasi yang tangguh yang tercermin dari rasa cinta, bangga, hormat, dan loyal kepada negara, cita-cita nasionalisme dapat terwujud. Dalam integrasi nasional masyarakat termotivasi untuk loyal kepada negara dan bangsa. Dalam integrasi terkandung cita-cita untuk menyatukan rakyat mengatasi SARA melalui pembangunan integral. Integrasi nasional yang solid akan memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan yang berhasil akan memberikan dampak positif terhadap negara dan bangsa sebagai perwujudan nasionalisme. Dengan berhasilnya pembangunan sebagai wujud nasionalisme, konflik-konflik yang mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi dapat diatasi karena integrasi nasional memerlukan kesadaran untuk hidup bersama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis. Negara dan bangsa sebagai institusi yang diakui, didukung, dan dibela oleh rakyat diharapkan mampu mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat dan memperjuangkan nasib seluruh warga bangsa.

Dalam mengatasi isu-isu disintegrasi, pemerintah perlu melegalkan tuntutan mereka sejauh masih dalam koridor NKRI. Seluruh warga bangsa perlu berempati pada masyarakat Papua, Aceh, dan Maluku. Perlu dimengerti bahwa masyarakat Papua adalah Indonesia yang di dalamnya terdiri dari banyak etnis, sebab tanpa Aceh dan Papua Indonesia bukan "Indonesia Raya" lagi. Dengan menaruh rasa empati kepada mereka, serta disertai tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat yang menginginkan untuk berpisah tersebut dapat menyadari bahwa mereka dan "kita" adalah satu untuk mewujudkan kepentingan bersama, kemakmuran bersama, rasa keadilan bersama, dalam wadah NKRI. Namun bila isu-isu tidak pernah ditanggapi dan justru dengan pendekatan keamanan (militer), hal ini akan menimbulkan kesulitan di masa yang akan datang. Tututan yang wajar perlu diakomodasikan sehingga mungkin dapat meredakan keinginan berpisah dari NKRI. Perlu dicatat bahwa pemerintah RI harus meningkatkan kesejahteraan

seluruh warga bangsa karena hal ini merupakan kunci terciptanya integrasi nasional demi terwujudnya cita-cita nasionalisme. Dalam usaha mencapai tujuan nasional, masih banyak yang memiliki pandangan berbeda. Sebagai contoh hasil penelitian dari Susanto, A., & Prasetyo, B. (2019), bahwa implementasi wawasan nusantara berkontribusi pada peningkatan kerja sama antarwilayah di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Siregar, R. Y., & Fitriani, A. (2020), bahwa integrasi nasional memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Untuk itu pemerintah telah merumuskan pandangan nasional yang komprehensif dan integral yang dikenal dengan wawasan nusantara. Wawasan ini akan memberikan konsepsi yang sama kepada peserta didik tentang visi ke depan bangsa Indonesia untuk menciptakan kesatuan dan persatuan secara utuh, sehingga dapat mewujudkan integrasi nasional. Adanya nilai-nilai nasionalisme, khususnya nilai kesatuan, sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional. Dengan demikian nilai-nilai wawasan nusantara, khususnya nilai kesatuan, yaitu kesatuan IPOLEKSOSBUD-HANKAM sangat mendukung adanya integrasi nasional.

PENUTUP

Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan freksi-freksi antar kelompok dalam konteks sosologis, politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami dan sosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan IPOLEKSOSBUD-HANKAM tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat sebagai harga mati yang normatif.

Dengan persepsi yang sama diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesehatan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Suatu persepsi atau pandangan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama akan merugikan kesatuan, kebersamaan dan keserasian sehingga menimbulkan gejolak sosial yang dapat merugikan bangsa keseluruhan sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Perilaku korupsi, mementingkan diri sendiri, tidak bertanggung jawab, tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas akan mengakibatkan perilaku bunuh diri bersama-sama. Negara yang tidak bisa menyamakan persepsi atau pandangan yang sama akan menimbulkan konflik yang berlarut-larut sehingga menghasilkan bangsa yang gagal.

Pembinaan dan sosialisasi Wawasan Nusantara sangat penting bagi negara bangsa karena dapat menghasilkan Ketahanan Nasional. Daya tahan yang kuat bagi suatu bangsa dan kerja sama yang sinergis antar bidang (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang diusahakan terus menerus dapat menghasilkan integrasi nasional yang utuh menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumardiman, dkk. 1982. *Wawasan Nusantara*, Jakarta: Yayasan Harapan Nusantara.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education*
- Breully, J. (2016). *Nationalism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Brubaker, R. (2019). *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge University Press.
- Chaidir Basrie, 2002. *Pemantapan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan Nasional*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.
- Dimiyati, M. 1972. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Penerbit Bharat Karya Aksara.
- Dirjendikti Depdiknas 2002. *Konsepsi Wawasan Nusantara Rumusan Setjen Wanhankamnas*, Jakarta:..
- Ermaya Suradinata, dkk. 2001. *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. Jakarta:Paradigma Cipta Tatrigama.
- Filip Litay. 1997. *Integrasi Nasional*. Jakarta.
- Hasyim Djalal. 2000. *Masa Depan Indonesia Sebagai Negara Kesatuan Ditinjau Dari Segi Hukum Laut dan Kelautan*. Tanpa Kota Penerbit dan Penerbit.
- Hadiwinata, B. S. (2016). *Wawasan Nusantara: Sebuah Pemikiran untuk Memperkuat Integrasi Bangsa Indonesia*
- John Piaris. 1988. *Strategi Kelautan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Komaruddin, A. (2018). *Wawasan Nusantara dan Identitas Bangsa*
- Lemhanas. 1995. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Penerbit Ismujati.
- Munanjat Danusaputro, S.t. 1983. *Wawasan Dalam Hukum Laut PBB*. Bandung: Penerbit Alumni.
- .1982. *Indrajaya Seroja Dharma Mahasi Indonesia Raya Dalam Jelang Silang Dunia*, Jakarta: Penerbit Binacipta.
- Nursal, A. (2020). *Wawasan Nusantara: Dari Visi Bangsa hingga Tantangan Pembangunan di Era Global*
- Sartono Kartodirdjo. 1993. *Integrasi Nasional*. Yogyakarta, UGM.

- Siregar, R., Wahyudi, S., & Wijaya, R. (2019). Pengembangan Wawasan Nusantara di Era Transformasi Pembangunan Nasional
- Sobana, An. 2002. Wawasan Nusantara. Jakarta: Dikti Depdiknas.
- Sudibyo, A., & Azra, A. (2018). Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Wawasan Nusantara dalam Kurikulum 2013
- Soesastro, H., & Arifin, B. (2015). Wawasan Nusantara and Indonesian Leadership in Global Governance
- Situ Gintung, H., Yusoff, Y., & Ahmed, S. (2017). The Concept of Wawasan Nusantara in the Context of Indonesian Marine Resource Management
- Sumarsono, dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suwarsono, 1981. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Penerbit Hakcipta.
- , tanpa kota Penerbit. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia UU No. 5 Tahun 1983. Tentang Zona Ekonomi.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Human Development Report
- United Nations Development Programme (UNDP). (2018). Gender Inequality Index
- United Nations Development Programme (UNDP). (2017). Human Development Report
- Wardhana, W. (2019). Implementasi Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
- World Bank. (2019). World Development Report: The Changing Nature of Work
- Wibowo, A., Ramdhani, M. A., & Darmaningtyas, D. P. (2018). Wawasan Nusantara dalam Pendidikan Sejarah untuk Penguatan Identitas Nasional

Berita Koran

- Kompas, 20 April 2005.
- Kompas, 18 Mei 2009.
- Revisond Baswir, KR, 17 Mei 2009.
- Rusman Ghazali, Kompas, 28 April 2005
- Siswono 2005: 4
- Suharto, KR, 25 Mei 2009
- Sutjipto Raharjo, Kompas, 18 Mei 2009

Berita TV dan Vedio

- Metro TV Mei 2009.
- Metro TV 20 Mei 2009. Prabowo berkampanye untuk menjadi Calon Presiden Amin Rais, Juni 2008. "Slamatkan Indonesia"